



MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMILU SEBAGAI AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMILU

ARFIANTO PURBOLAKSONO

MANAJER RISET DAN PROGRAM

THE INDONESIAN INSTITUTE, CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

 THE **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMILU

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mendefinisikan manajemen risiko dalam pemilu sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu.

Manajemen risiko biasanya merujuk pada proses-proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi.

TABEL 1. FAKTOR RISIKO INTERNAL DAN EKSTERNAL

Faktor risiko internal*	Faktor risiko eksternal
1. Kerangka hukum pemilu yang dipertentangkan	1. Kondisi sosial-ekonomi
2. Perencanaan dan manajemen pemilu yang buruk	2. Pengecualian sosial dan politik
3. Pelatihan dan pendidikan yang buruk	3. Dinamika perubahan kekuasaan
4. Penyelesaian sengketa pemilu yang tidak memadai	4. Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender
5. Pendaftaran pemilih dan partai politik yang bermasalah	5. Munculnya aktor bersenjata bukan negara
6. Kampanye pemilu yang memanas	6. Adanya kejahatan yang terorganisasi
7. Pelaksanaan pemungutan suara yang bermasalah	7. Keluhan terkait genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang
8. Hasil pemilu yang disengketakan	8. Pelanggaran hak asasi manusia
	9. Perilaku media yang tidak etis
	10. Bahaya lingkungan

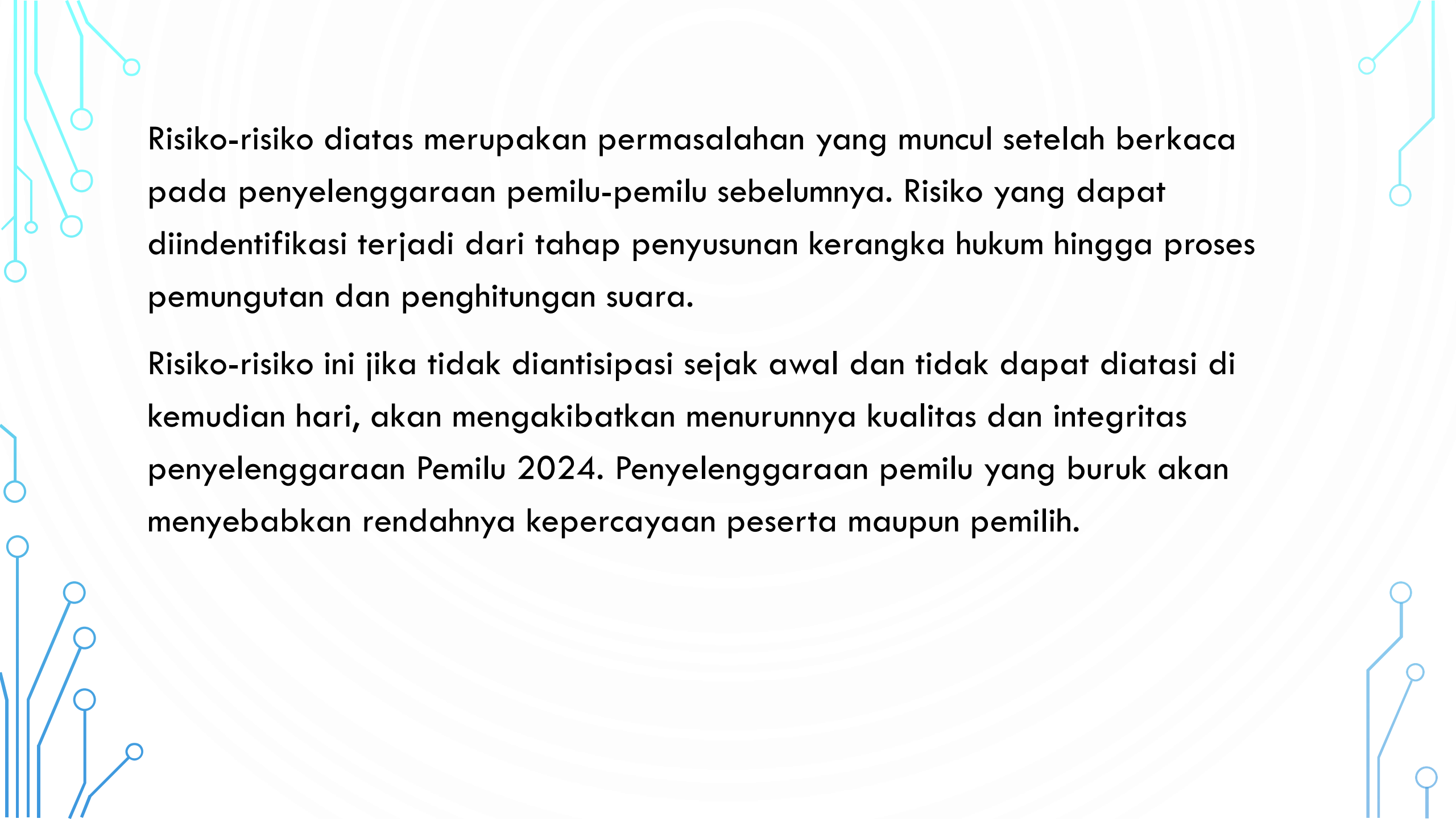
Sumber: Internasional IDEA (2016)

TABEL 2. FAKTOR RISIKO INTERNAL PEMILU 2024

Faktor Internal	Analisis Risiko
Kerangka Hukum	Diperlukan regulasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Selain itu, diperlukan penyamaan pandangan dari KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di antara dua lembaga penyelenggara pemilu dapat menjadi risiko bagi penyelenggaraan Pemilu serentak dan Pilkada di tahun 2024
Perencanaan dan Manajemen Pemilu	Persoalan anggaran dan waktu akan menjadi risiko yang perlu untuk diantisipasi. Hal ini penting karena alokasi anggaran lebih banyak terserap dan diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Pelatihan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM)	Berkaca dari Pemilu 2019, pemilu serentak sangat menguras tenaga. Tidak sedikit petugas pemilu yang sakit dan ada yang meninggal dunia. Berdasarkan data KPU jumlah korban meninggal yang terverifikasi dan tervalidasi adalah sebanyak 708 orang. Sementara, yang dilaporkan sakit sebanyak 749 orang (KPU, 2019). Pendidikan dan pelatihan bagi personil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi risiko yang perlu untuk diperhatikan.
Pendaftaran Pemilih	Persoalan pendaftaran pemilih menjadi risiko yang harus diperhatikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Pasalnya, persoalan pendaftaran pemilih menjadi persoalan yang kerap muncul pada setiap pemilu.
Kampanye Pemilu	Risiko yang terjadi pada masa kampanye, yaitu munculnya polarisasi pendukung calon presiden yang disertai ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta meningkatnya penyebaran berita bohong di sosial media.
Pelaksanaan Pemungutan Suara	Berkaca pada Pemilu 2019, proses pencoblosan suara diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Sama halnya dengan Pemilu 2019, pemilih akan memilih Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

TABEL 3. FAKTOR RISIKO EKSTERNAL PEMILU 2024

Faktor Eksternal	Analisis Risiko
Munculnya aktor bersenjata bukan negara	Munculnya aktor bersenjata bukan negara hadir di daerah yang rawan konflik, seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini tentunya akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024. Keamanan bagi petugas penyelenggara pemilu sangat penting untuk dijaga. Begitu juga di saat proses tahap kampanye, pemungutan suara hingga penghitungan suara.
Kondisi sosial-ekonomi	Indonesia masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana alokasi anggaran lebih banyak terserap dan diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Selain itu, ancaman munculnya varian baru COVID-19 akan menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemilu dalam mengatur tahapan pemilu dan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.
Perilaku media yang tidak etis	Perilaku media yang tidak etis dapat dilihat dengan meningkatnya penyebaran berita bohong di sosial media. Sosial media saat ini menjadi saluran informasi baru bagi masyarakat.



Risiko-risiko diatas merupakan permasalahan yang muncul setelah berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Risiko yang dapat diidentifikasi terjadi dari tahap penyusunan kerangka hukum hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.

Risiko-risiko ini jika tidak diantisipasi sejak awal dan tidak dapat diatasi di kemudian hari, akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih.



MEMPERKUAT CIVIC TECH DAN DATA PEMILU TERBUKA UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS

HASIL STUDI TII TAHUN 2021 YANG DIDUKUNG OLEH RESPECT USAID DAN PERLUDEM.

LAPORAN STUDI INI DAPAT DI UNDUH DI LINK BERIKUT: [HTTPS://BIT.LY/37XB8G7](https://bit.ly/37XB8G7)



EKOSISTEM CIVIC TECH TERKAIT DATA PEMILU TERBUKA

TEMUAN DAN ANALISIS

Kepemimpinan dan Komitmen Politik

Keterlibatan Indonesia pada
Open Government Partnership
(OGP)

Pembentukan Open Government
Indonesia

Penguatan Data Pemilu Terbuka
pada Rencana Aksi Nasional
untuk Open Government
Indonesia (OGI) 2020-2022

Komitmen KPU untuk membuat
berbagai sistem informasi
mengenai data pemilu, seperti
SIDALIH, SIPOL, dll.

Tantangan komitmen politik
mengenai data pemilu terbuka

- Keterbatasan anggaran
- Ketidaksamaan visi dan komitmen dari *stakeholder* terkait data pemilu terbuka
- Penolakan dari kandidat pemilu untuk membuka profil mereka (kerahasiaan data)
- Interpretasi beragam mengenai peraturan pemilu

Ekosistem *Civic Tech* terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Kerangka Hukum dan Kebijakan Utama

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 14 huruf c
- Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Manajemen Layanan Informasi Publik KPU
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilu Daerah
- Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

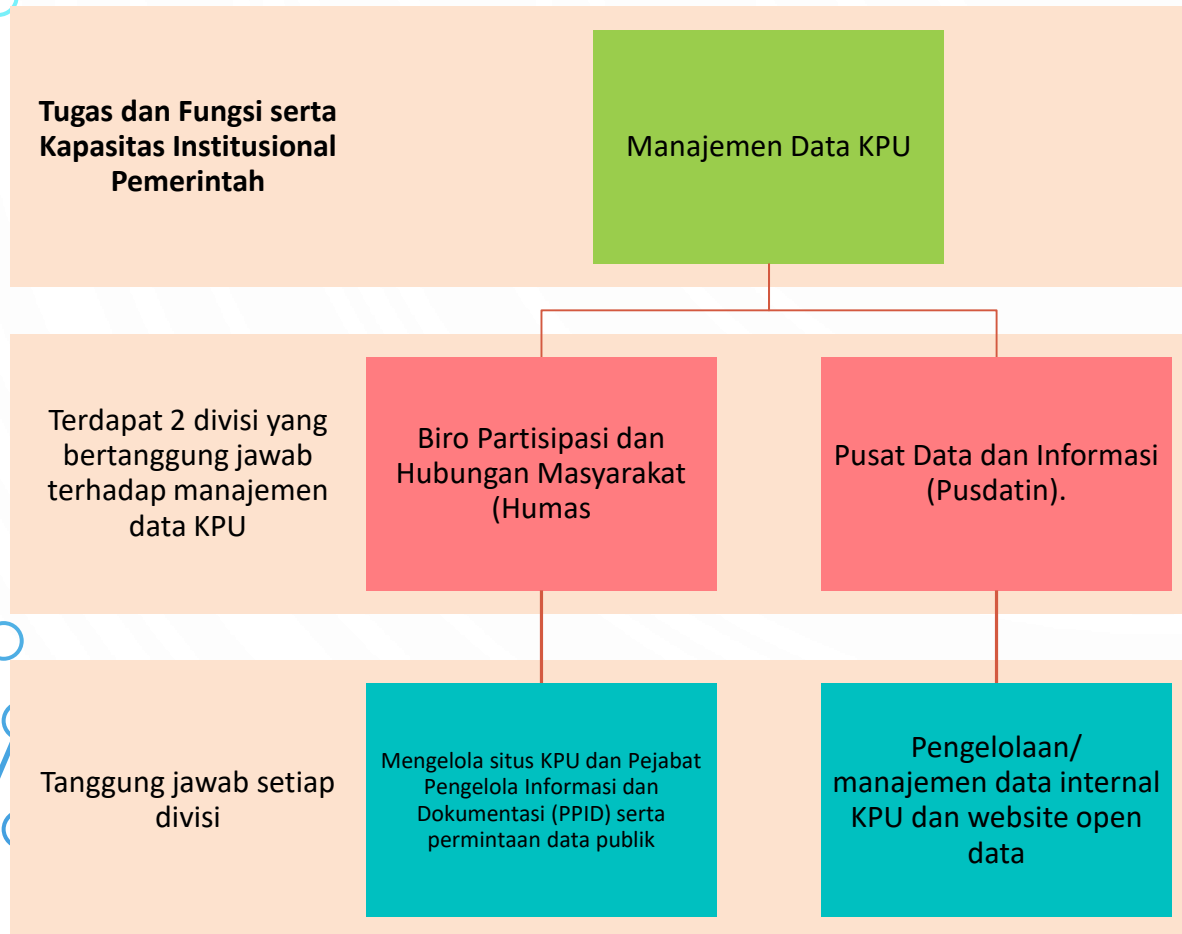
Kerangka hukum sebagai landasan untuk membuka informasi publik dan pengaturan terhadap tata kelola satu data telah tersedia. PKPU No. 5 Tahun 2021 dan PKPU No. 6 Tahun 2021 juga telah mengatur perlindungan data. ***Namun, diperlukan ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis yang menyebutkan prinsip keterbukaan data pemilu.***

Ekosistem *Civic Tech* mengenai Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Tantangan Tugas dan Fungsi serta Kapasitas Institusional Pemerintah

- Berdasarkan observasi per 7 Desember 2021, masih belum terintegrasi data dalam “Satu Pintu” dan datanya masih terpisah. Hal ini terlihat dengan Humas mengelola website KPU dan PPID. Sedangkan Pusdatin mengelola website open data KPU
- Keluarnya PKPU No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU diharapkan dapat menjadi regulasi agar data dalam “satu pintu”.
- Perlunya ketersediaan dan kapabilitas SDM IT mengenai pemenuhan kebutuhan pengguna yang beragam, seperti kelompok disabilitas.



Ekosistem *Civic Tech* terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Sumber Data Pemilu yang Dikelola KPU

- Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH)
- Sistem Informasi Calon (SILON)
- Sistem Informasi Logistik (SILOG)
- Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL)
- Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)
- Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemilu (SIREKAP)

Prosedur dan Kebijakan Pengelolaan dan Ketersediaan Data

Catatan observasi per 7 Desember 2021, terhadap situs KPU, PPID KPU dan Open Data KPU, data belum terintergrasi dalam satu pintu.

Pada website open data KPU, data telah tersedia dalam bentuk API serta format lain seperti json, csv, doc, xls, dan pdf.

Pada situs Open Data KPU, situs tersebut belum mengikutsertakan fitur *yang* memudahkan pembaca disabilitas mengakses data menggunakan *screen reader*.

Catatan:

- Sudah terdapat SOP mengenai Manajemen Layanan Informasi Publik pada PKPU Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur manajemen data mulai dari pengumpulan sampai verifikasi data hingga data dapat diakses.
- Sudah terdapat regulasi yang mengatur tata kelola data pada PKPU Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU

Ekosistem *Civic Tech* terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Ekosistem *Civic Tech* terkait Data Pemilu Terbuka

Kluster: Data Access & Transparency

- Kawal Pemilu
- Jari Ungu
- Rumah Pemilu
- Jejak Parlemen
- API Pemilu
- Info Pemilu KPU (Penyelenggara Pemilu)

Kluster: Data Utility

- Rekam Jejak ICW
- Open Tender ICW

Kluster: Data Visualization & Mapping

- Data Geospasial Politik Cakra Wikara

Kluster: Community Feedback

- Mata Massa
- Pelaporan Bawaslu (Penyelenggara Pemilu)

GESI:

Sebagian besar inisiatif pada tabel di samping tidak menyebutkan prinsip GESI dalam inisiatif/aplikasi mereka. Namun, sebagian besar dari mereka memang fokus pada data yang menyangkut isu-isu inklusi sosial.

- Untuk mendorong keterlibatan *Civic Tech*, banyak inisiatif yang telah dilakukan misalnya menyelenggarakan *hackathon* seperti yang diselenggarakan oleh Perludem bersama beberapa partner bertajuk **“Code for Vote” pada tahun 2014.**
- Terdapat partner potensial dari kalangan komunitas IT yang dapat diajak berkolaborasi, yaitu Google Developer Groups, Open Data Labs dan Data Science Indonesia.



Ekosistem *Civic Tech* terkait Data Pemilu Terbuka

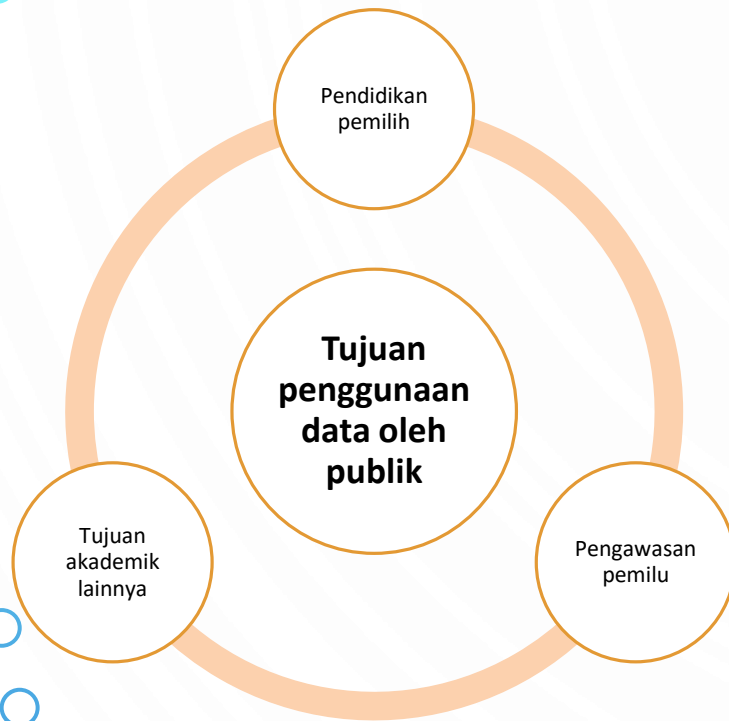
Temuan dan Analisis

Dukungan Anggaran

- Keluarnya PKPU No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU memungkinkan KPU meningkatkan anggaran untuk peningkatan infrastruktur dan SDM terkait dengan manajemen data KPU berbasis elektronik
- Keluarnya PKPU No. 5 Tahun 2021, juga memungkinkan KPU bekerja sama dengan instansi pemerintah, penyedia barang/jasa, *Civic Tech*, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Dukungan anggaran juga dapat diberikan kepada inisiatif *Civic Tech* untuk mendukung keberlanjutan program. Anggaran tersebut dapat berasal dari pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Swakelola).
- Kontribusi swasta dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki concern terhadap data pemilu terbuka, seperti Microsoft dan Google.
- Untuk mengoptimalkan hal ini, perlu ada kolaborasi dengan *influencer* maupun komunitas yang mampu memobilisasi keterlibatan masyarakat secara lebih luas pada isu Data Pemilu Terbuka.

Ekosistem *Civic Tech* terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis



Permintaan Data Publik

- Banyak CSO seperti Perludem, Netgrit, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Cakra Wikara, dan PPUA Disabilitas, menggunakan data pemilu untuk memastikan penyelenggara pemilu menyediakan data pemilu terbuka. Begitupun, institusi akademik dan *think-tank* menggunakan data pemilu untuk tujuan riset dan evaluasi.
- Permintaan data pemilu terfasilitasi dengan baik, perlu ada beberapa hal: memastikan data pemilu tersedia dengan baik, seperti data kandidat pemilu yang biasanya sulit diperoleh, serta integrasi data (dalam hal ini data kandidat) yang menampilkan data *incumbent* dan kandidat baru, baik latar belakang maupun karirnya secara historis.
- Saat ini, KPU telah memiliki dan mengembangkan website open data KPU: <https://opendata.kpu.go.id/>, sehingga permintaan data nantinya bersifat satu pintu.
- Dalam website open data KPU, walaupun data belum lengkap namun telah tersedia dalam bentuk API serta format lain seperti json, csv, doc, xls, dan pdf.

Ekosistem Civic Tech mengenai Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Infrastruktur Teknologi dan Keterampilan SDM

Kombinasi strategi digital via internet (media sosial, situs, mobile apps), SMS dan manual (brosur) untuk penyebaran informasi mengenai keterbukaan data pemilu.

Penambahan fitur penting di situs yang dikembangkan, seperti fitur heading, “alt-text” dan link unik yang akan memudahkan kelompok pengguna disabilitas dalam membaca informasi menggunakan *screen reader*.

Peningkatan kapasitas dari SDM, terutama penyelenggara pemilu di tingkat pusat maupun daerah. Caranya dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan NGO dan komunitas *Civic Tech*, membangun jejaring untuk berbagai standar dan praktik baik mengenai pengelolaan data pemilu terbuka, dan forum relevan lainnya untuk berbagi pengalaman dan keahlian.

Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Pentingnya *Open Data* untuk mendorong integritas pemilu:

Akuntabilitas publik mengenai data-data pemilu terintegrasi dan institusi elektoral, baik secara horisontal (kejaksaan dan lembaga legislatif) maupun vertikal (kelompok masyarakat maupun publik secara umum)

Kebebasan informasi yang akan memudahkan partisipasi kreatif dan inovasi dari publik.

9 Prinsip Data Pemilu Terbuka

Timely

Granular

Available free on the internet

Complete and in bulk

Analyzable

Non-proprietary

Non-discriminatory

License-free

Permanently available

Berdasarkan prinsip tersebut, KPU perlu:

- Menyediakan format dan visualisasi data pemilu yang aksesibel bagi pengguna yang beragam, termasuk kelompok disabilitas.
- Menyediakan data yang dapat diunduh dengan prinsip *complete and in bulk*.

Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

No	Key Election dataset	Rating (Observasi Website KPU, September 2021)
1	Legal Frameworks	Mostly Open
2	Election Management Body and Administration	Mostly Open
3	Election Management Body Processes	Mostly Open
4	Electoral Boundaries	Mostly Open
5	Election Security	Not Open
6	Political Party Registration	Partially Open
7	Ballot Qualification	Mostly Open
8	Election Campaign	Mostly Open
9	Campaign Finance	Partially Open
10	Voter registration	Partially Open
11	Voter Lists	Partially Open
12	Voter Education	Mostly Open
13	Polling Stations	Partially Open
14	Election Results	Not Open
15	Electoral Complaints and Disputes	Partially Open
16	E-Voting and Counting	Not Available

Di Indonesia, terdapat beberapa sumber data pemilu yang telah dikelola oleh KPU, yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Calon (SILON), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), dan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemilu (SIREKAP).

Voters registered		Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	No
Voters that participated		No	No	No	No	No	No	No	No	No
Ballots spoiled		No	No	No	No	No	No	No	No	No
Invalid votes		No	No	No	No	No	No	No	No	No
Blank votes cast		No	No	No	No	No	No	No	No	No
Valid votes for each contestant		Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Electoral Complaints and Disputes (1. KPU 2. Bawaslu)	Partially Open									
Complaints submitted		No	No	No	No	No	No	No	No	No
Complaints resolved		No	No	No	No	No	No	No	No	No
Complaints submitted		Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes

Ekosistem *Civic Tech* dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Kesimpulan

Elemen Ekosistem Civic Tech	Rating
Kepemimpinan dan Komitmen Politik	Hijau
Kerangka Hukum dan Kebijakan Utama	Hijau
Tugas dan Fungsi serta Kapasitas Institusional Pemerintah	Kuning
Prosedur dan Kebijakan Pengelolaan dan Ketersediaan Data	Kuning
Keterlibatan dan Kapasitas Kelompok Masyarakat	Hijau
Dukungan Anggaran	Hijau
Permintaan Data	Kuning
Infrastruktur Teknologi dan Keterampilan SDM	Merah

Keterbukaan Data Pemilu

- Karena belum terintegrasi maka prinsip “granular” belum terpenuhi.
- Prinsip “analyzable” telah terpenuhi karena data telah tersedia dalam format CSV, Excel, JSON, dan PDF.
- Namun, prinsip “complete in one bulk” belum terpenuhi karena dataset masih dalam bentuk yang terpisah-pisah.
- Terjadi perubahan lebih baik terkait dataset “election result” dan “voter list”. Hal ini karena data set telah tersedia di website open data KPU

REKOMENDASI

Keterlibatan Masyarakat:

- Mendorong KPU untuk berkolaborasi dengan CSO, swasta, civic tech, dan aktor lainnya melalui Forum Data dan Informasi.
- Mendorong KPU untuk berkolaborasi dengan komunitas teknologi di tingkat lokal dan nasional, seperti Google Developer Group, Open Data Lab dan Data Science Indonesia serta CSO di isu elektoral (Perludem, Netgrit, Cakra Wikara, Sindikasi Pemilu Demokrasi, PPUA Disabilitas).

Dukungan Anggaran:

- Mendorong KPU untuk berkolaborasi dengan lembaga donor dan sektor privat melalui perjanjian yang jelas dan terbuka untuk mendorong praktik keterbukaan data pemilu oleh KPU maupun inisiatif civic tech.
- KPU melakukan pemetaan ekosistem penganggaran bagi civic tech di bidang keterbukaan data pemilu.

REKOMENDASI

Permintaan Data Publik

- Mendorong KPU untuk memberikan data yang mudah diakses dan terintegrasi serta sesuai dengan prinsip open data

Infrastruktur Teknologi dan Keterampilan SDM

- Mendorong KPU untuk menyediakan medium informasi yang ramah terhadap kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat dengan karakteristik wilayah geografis tertentu. Di samping itu, peningkatan infrastruktur internet perlu dioptimalisasi di seluruh area di Indonesia.
- Mendorong peningkatan kapasitas IT di tubuh penyelenggara pemilu dengan kolaborasi dengan NGO dan komunitas *Civic Tech*, seperti Digital Talent Program oleh Kominfo.

REKOMENDASI

Meningkatkan Keterbukaan Data Pemilu di Indonesia:

- KPU mempersiapkan sistem untuk menerapkan data pemilu terbuka di Pemilu 2024, seperti Peta Jalan untuk Pemilu 2024 dan persiapan teknis (contoh: penggunaan QR code untuk mengidentifikasi pemilih)
- Meningkatkan kualitas SDM IT KPU dan prinsip inklusivitas sosial (GESI) dalam pengelolaan dan permintaan data
- Membangun budaya keterbukaan data pemilu dengan menginternalisasikan prinsip open data dalam tubuh KPU
- Pemerintah menyediakan infrastruktur ICT di berbagai level, termasuk konektivitas, manajemen dan keterampilan
- Mendorong KPU untuk mengoptimalkan penyediaan data pemilu terbuka, sehingga tidak ada lagi data yang dianggap tidak terbuka

TERIMA KASIH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta

Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Telepon: +6221 3158032

Email: contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com



contact@theindonesianinstitute.com



[@indonesian.institute](https://www.instagram.com/theindonesian.institute)



[@the_indonesian](https://twitter.com/the_indonesian)